

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020**

Informasi yang dikecualikan

adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi harus didasarkan pada **pengujian konsekuensi**.

➤ **Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :**

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

➤ **Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :**

- Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan
- Badan publik
- Jangka waktu pengecualian
- Alasan pengecualian
- Tempat dan tanggal pengecualian

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN**

INFORMASI SECARA BERKALA						
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
1	Hasil Assessment Pengujian PNS	Perka BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	BKD	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	BKD	Sampai dengan pengumuman	Menimbulkan keresahan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3	Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja PNS	PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	BKD	Selama undang-Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4	Data Usulan Pemindahan Pengangkatan PNS (mutasi)	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	BKD	Sampai diterbitkannya SK	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
5	Ijin Perceraian PNS	PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS	BKD	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung

INFORMASI SECARA BERKALA

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
6	Hukuman Disiplin Pegawai	PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	BKD	Tak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKD	Selama Proses Penerimaan CPNS	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	BKD	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Madiun, 12 Februari 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MADIUN

Drs. HARI RAHMANUDIN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660813 199203 1 009